



# Kukuhkan KPAID, Tingkatkan Perlindungan Anak

**KOTA, Joglo Jogja** – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengukuhkan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta periode 2023-2027, Selasa (7/2). Pengukuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait perlindungan anak.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan, KPAID didorong untuk bisa mewujudkan

Kota Yogyakarta sebagai kota layak anak paripurna. Mengingat tahun sebelumnya predikat tersebut hampir didapat.

“Selamat kepada para komisioner yang baru dikukuhkan. Harapannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan hak-hak anak,” kata Sumadi kepada Joglo Jogja, kemarin.

Terdapat tujuh komisioner KPAID Kota Yogyakarta periode 2023-2027 yang te-

**“Selamat kepada para komisioner yang baru dikukuhkan. Harapannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan hak-hak anak,”**

**Sumadi**

Penjabat Walikota Yogyakarta

lah dikukuhkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam komisioner pernah menjabat KPAID periode sebelumnya.

KPAID diharapkan lebih aware terhadap isu-isu perlin-

dungan anak yang perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari informasi percobaan penculikan anak, sampai tindak kekerasan pada anak. Termasuk juga bentuk kekerasan baru pada anak di media sosial. Terlebih pada konten ujaran kebencian serta penyebaran foto dan video yang bertujuan menyakiti, menakuti, dan menengancam korban.

■ **Baca KUKUHKAN ... Hal II**



**BERSAMA:** Penjabat Walikota Sumadi saat bertof bersama usai mengukuhkan pengurus KPAID Kota Yogyakarta, Selasa (7/2).

## Kukuhkan KPAID, Tingkatkan Perlindungan Anak

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Pihaknya menegaskan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab negara. Hal ini mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Sehingga, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan serta melakukan dukungan penuh untuk mewujudkan wilayah ramah anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Yogyakarta Edy Muhammad menambahkan,

penetapan KPAID Kota Yogyakarta 2023-2027 berdasarkan keputusan Walikota nomor 26 tahun 2023. Masa bakti komisioner tahun ini menjadi lima tahun dari sebelumnya hanya tiga tahun. Hal ini didasarkan pada peraturan Walikota terbaru.

“Komisioner yang lama telah dievaluasi dengan hasil sangat memuaskan. Sehingga ditetapkan untuk dipilih kembali,” katanya.

Selain itu, dalam pengisian kekosongan satu komisioner baru dipilih karena dip periode sebelumnya ada satu komisio-

er yang mengundurkan diri. “Itu sudah melalui seleksi kriteria,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPAID Kota Yogyakarta 2023-2027 Sylvi Dewajani menyampaikan, pada periode ini akan menggiatkan pada lima isu strategis untuk melindungi hak-hak anak. Kelima isu itu yakni perlindungan khusus anak, pornografi anak, pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah dan pesantren, ruang fisik kota yang ramah bagi anak remaja serta kesehatan mental anak. (cr5/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005